

REKONSILIASI POLITIK DAN PEMBENTUKAN KABINET BARU PERIODE 2019-2024

25

Juniar Laraswanda Umagapi
Debora Sanur L.

Abstrak

Hasil Pemilu Presiden tahun 2019 telah menetapkan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan membahas tentang bagaimana rekonsiliasi politik bagi rencana pembentukan kabinet baru pemerintahan Jokowi-Ma'ruf periode tahun 2019-2024. Ditemukan bahwa rekonsiliasi politik setelah proses pemilu merupakan hal yang penting dilakukan, agar setiap pihak bersedia untuk menyamakan visi dan misi mereka demi tercapainya tujuan bersama. Rekonsiliasi bukan hanya berarti keturutsertaan pihak oposisi atau lawan politik di dalam kabinet pemerintahan, namun rekonsiliasi dimaksudkan agar setiap pihak bersedia untuk menyamakan visi dan misi mereka demi tercapai tujuan yang sama. Pada periode mendatang kabinet diperkirakan akan diisi oleh partai pendukung presiden, meskipun demikian, posisi menteri dalam kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Oleh sebab itu, DPR RI sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan perlu terus bersinergi dengan pemerintah sekaligus tetap objektif dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas jalannya pemerintahan periode 2019-2024 mendatang.

Pendahuluan

Pada tanggal 27 Juni 2019 Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan untuk menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dengan demikian berdasarkan putusan tersebut maka pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan memimpin Indonesia periode 2019-2024.

Putusan tersebut juga mengukuhkan data KPU yang menyatakan bahwa dari total 813.336 TPS yang tersebar di dalam dan luar negeri, pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin telah memperoleh 84.243.353 suara atau 55,27 persen, sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 68.179.021 suara atau 44,73 persen (kpu.go.id, 2 Juli 2019).

Data KPU dan Putusan MK yang menyatakan bahwa pasangan capres



dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin telah memenangkan Pemilu Presiden 2019 tentu berdampak bagi pasangan calon tersebut dan partai-partai pengusungnya. Hal ini karena setiap pihak yang terlibat mulai mempersiapkan program kinerja bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendatang. Salah satu hal yang tengah dipersiapkan ialah mengenai susunan kabinet bagi terciptanya pemerintahan yang stabil dan dapat berkinerja secara optimal.

Penciptaan suasana kondusif dan berkinerja baik tentu akan mudah diwujudkan bila setiap pihak yang sebelumnya memiliki kubu berbeda dalam pilpres kembali melakukan rekonsiliasi pasca-pilpres. Menurut Mahfud MD kontestasi politik di Indonesia akan selalu berujung pada rekonsiliasi. Menurutnya, dalam budaya politik Indonesia rekonsiliasi selalu terjadi dan tidak dapat dihindari. Hal ini dilakukan demi kepentingan bersama, tidak mungkin antarpol terus saling bermusuhan (detik.com, 3 Juli 2019). Oleh sebab itu, agar pemerintahan periode mendatang dapat berkinerja optimal perlu terjadi rekonsiliasi antara kubu pasangan calon Jokowi dan kubu pasangan calon Prabowo. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan dalam tulisan ini ialah bagaimana rekonsiliasi politik bagi pembentukan kabinet pasca-penetapan presiden dan wakil presiden?

Rekonsiliasi Politik

Menurut Lederach rekonsiliasi merupakan perbaikan hubungan relasi di antara pihak-pihak yang berkonflik dan dilakukan secara berkesinambungan. Dalam hal ini setiap pihak perlu untuk meninggalkan sejarah masa lampau akan kebencian serta kemarahannya

demi membangun masa depan bersama yang lebih baik. Perbaikan relasi tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan agar kelangsungan proses pembangunan bersama dapat berjalan lancar tanpa terganggu konflik-konflik yang muncul kemudian. Dengan kata lain, rekonsiliasi sesungguhnya difokuskan kepada bagaimana setiap pihak dapat membangun kembali hubungan yang telah rusak akibat dari konflik (John Paul Lederach, 1999: 29). Berdasarkan konsep tersebut, rekonsiliasi politik tentu menjadi sangat penting dilakukan bagi pemerintahan presiden periode 2019-2024 mendatang.

Ada berbagai cara yang dapat dilakukan dalam mewujudkan rekonsiliasi. Salah satu seperti rekonsiliasi dalam perbaikan relasi yang diupayakan Partai Demokrat dengan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) pasca-pilpres 2019. Kebekuan hubungan antara PDIP dan Partai Demokrat mulai terlihat mencair sejak Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri menghadiri upacara pemakaman Ani Yudhoyono. Dilanjutkan dengan kunjungan yang dilakukan oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono ke kediaman Megawati pada hari pertama Idul Fitri. Hal ini juga didukung oleh pendapat Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah yang mengatakan bahwa pada dasarnya PDIP dapat berkoalisi dengan partai mana pun dalam pembentukan pemerintahan mendatang, sehingga tidak menutup kemungkinan bila PDIP akan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Terlebih, dalam sejumlah pemilihan kepala daerah PDIP dan Partai Demokrat telah terbukti berhasil menjalin koalisi secara terbuka (cnnindonesia.com, 9 Juni 2019).

Meskipun demikian, kurang tepat bila konsep rekonsiliasi hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk membuat partai non-pendukung maupun oposisi menjadi partai pro-pemerintah. Rekonsiliasi tidak dapat hanya diartikan menjadi keturutsertaan pihak oposisi atau lawan politik di dalam kabinet pemerintahan. Sebaliknya, rekonsiliasi dimaksudkan agar setiap pihak bersedia untuk menyamakan visi dan misi mereka demi tercapai tujuan yang sama.

Oleh sebab itu, meskipun rekonsiliasi dilakukan namun pihak oposisi juga harus tetap menjadi pihak yang mengawal jalannya pemerintahan. Hal ini penting agar pemerintahan yang berjalan tidak berkuasa secara mutlak dan mengarah ke otoriter. Dalam pemerintahan posisi oposisi tidak berarti harus menentang seluruh kebijakan pemerintah, namun dapat menawarkan solusi atas sebuah permasalahan yang dihadapi bangsa. Oposisi menjadi aktor yang terus mengevaluasi kinerja pemerintah, menawarkan ide-ide alternatif membangun bangsa, serta menjadi penyalur aspirasi rakyat untuk terciptanya kinerja pemerintah yang efektif.

Peran oposisi dapat dilakukan oleh partai yang tidak berada dalam kabinet pemerintahan melalui DPR RI. DPR RI merupakan lembaga negara yang anggotanya juga dipilih langsung oleh rakyat untuk membawa aspirasinya. Oleh sebab itu, sebagai lembaga yang merepresentasikan kehendak rakyat dan memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah, DPR RI dapat menjalankan fungsinya dengan selalu melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah.

Pembentukan Kabinet

Meskipun peran oposisi penting dalam jalannya pemerintahan sebuah

negara, seringkali konsep rekonsiliasi hanya diartikan bahwa setiap partai pendukung lawan perlu berdamai dengan turut masuk dalam kabinet presiden pemenang pemilu. Kondisi tersebut membawa masyarakat pada munculnya wacana untuk memasukkan koalisi Prabowo-Sandi ke dalam kabinet pemerintahan. Hal ini tentu menimbulkan pro dan kontra. Bagi masyarakat yang pro masuknya kubu Prabowo-Sandi dalam kabinet merupakan perwujudan konkrit dari rekonsiliasi politik di Indonesia. Sementara itu, bagi masyarakat yang kontra masuknya kubu lawan kedalam kabinet dapat menimbulkan perasaan kecewa karena kerja keras dalam pemenangan Pemilu Presiden tidak membawa mereka masuk dalam posisi-posisi strategis di pemerintahan.

Selain itu, tentu saja bila terlalu banyak partai politik dalam kabinet maka pemerintahan akan sulit untuk berjalan efektif. Banyaknya suara yang harus disalurkan dapat membuat proses pengambilan keputusan berjalan lama dan sulit untuk mengambil kebijakan terbaik. Hal ini menyiratkan bahwa presiden memang tidak selalu perlu untuk mengundang setiap partai untuk bergabung dalam kabinet. Terlebih karena sebelum pemilu partai-partai peserta pemilu telah merapat menjadi dua kubu yang menjadi rival. Komposisi masing-masing dukungan dari partai-partai tersebut sudah membuat siapapun kubu calon presiden yang memenangkan pemilu akan memiliki koalisi yang gemuk. Dengan demikian, kubu oposisi lebih baik dalam menjalankan fungsinya sebagai alat penyeimbang (*check and balance*) bagi kubu pemerintah.

Komposisi partai yang memberi dukungan terhadap calon presiden

Jokowi pada Pemilu Presiden 2019 dapat dilihat dari tabel 1. Tabel ini juga dapat memberikan gambaran bagaimana perkiraan komposisi partai yang akan mengisi kabinet pemerintahan pada periode mendatang.

Jika melihat tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya setiap partai politik bebas menentukan untuk menjadi pendukung koalisi ataupun oposisi sesuai kepentingan partai politiknya. Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa baik dalam pilpres tahun 2014 maupun pilpres tahun 2019 komposisi partai pendukung Jokowi sudah cukup besar.

Pada tahun 2014, awal pembentukan kabinet, ada 15 (lima belas) orang menteri yang berasal dari partai politik, sedangkan 19 (sembilan belas) orang menteri lainnya berasal dari kalangan profesional. Sebanyak 15 (lima belas) orang menteri yang berasal dari partai merupakan kader dari partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Partai dalam koalisi tersebut ialah PDIP, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Keberadaan mereka dalam

kabinet juga sesuai dengan posisi partai dalam memperoleh suara di legislatif.

Saat itu PDIP berada pada urutan no 1 sehingga menempatkan 5 kadernya pada posisi menteri. PKB yang berada di urutan ke 5 suara legislatif dan urutan kedua terbesar dalam Koalisi Indonesia Hebat saat itu menempatkan 4 kadernya pada posisi menteri. Partai Nasdem yang berada dalam posisi ke 8 suara legislatif dan posisi ke 3 dalam koalisi tersebut menempatkan 3 kadernya pada posisi menteri. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menempatkan 1 kadernya pada posisi menteri dan Partai Hanura menempatkan 2 kadernya pada posisi menteri (Kompas.com, 26 Oktober 2014).

Data ini juga menunjukkan bahwa partai politik dapat mengubah posisinya setelah proses rekonsiliasi. Contohnya terlihat dari dukungan PPP dan Partai Amanat Nasional (PAN). Pada masa sebelum pilpres tahun 2014 kedua partai sebelumnya tidak mendukung calon presiden Jokowi, namun setelah rekonsiliasi pasca-penetapan pemenang pilpres kedua partai tersebut menjadi pendukung presiden dan turut mengutus kadernya dalam kabinet pemerintahan.

Tabel 1. Peta Koalisi Pendukung Jokowi

2014-2019 (sebelum pilpres 2019)	Pasca-Pilpres 2019	Pemilu 2019
Pendukung Jokowi PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, PKPI	Pendukung Jokowi PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, PKPI, PPP* ,PAN* ,Golkar	Pendukung Jokowi PDIP 19,33%, Golkar 12,31%, PKB 9,69%, Nasdem 9,05%, PPP 4,52% Tidak Lolos <i>Parlementary</i> <i>Threshold</i> 4% Hanura, PSI, Perindo, PKPI
Non-Pendukung Gerindra, PPP, PBB, PAN, PKS, Golkar, Demokrat**	Non-Pendukung Gerindra, PPP, PBB, PAN, PKS, Golkar, Demokrat**	Non-Pendukung Gerindra, PKS, Demokrat, PAN

*Bergabung menjadi pendukung setelah pilpres di menangi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla

**Partai demokrat berdiri sendiri tanpa koalisi

Sumber :Litbang Kompas/IWN Kompas, (24 April 2010). Di sarikan dari harian Kompas dan sumber lain.

Dengan melihat proporsi menteri tersebut maka untuk periode pemerintahan Jokowi mendatang kemungkinan posisi menteri kembali akan diduduki oleh PDIP, Partai Golongan Karya (Golkar), PKB, Nasdem, dan PPP karena keberadaan partai tersebut menguasai 60,7% dari total 575 kursi di DPR. Tanpa menambah partai di luar partai pendukung, konsolidasi yang sudah ada sudah cukup besar dan sudah cukup untuk membuat pemerintahan Jokowi leluasa menentukan arah perpolitikannya. Bila hal tersebut terjadi, maka Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan PAN dapat menjadi oposisi yang mengawasi setiap kebijakan pemerintah.

Oleh sebab itu meskipun rekonsiliasi perlu untuk dilakukan namun pemerintahan Jokowi 2019-2024 mendatang tidak selalu harus turut memasukkan oposisi dalam kabinet pemerintahan. Bahkan meskipun rekonsiliasi dilakukan dengan memasukkan partai non-pendukung ke dalam kabinet pemerintahan wakil presiden Jusuf Kalla menilai bahwa wajar jika ada partai tertentu yang mendapat porsi besar untuk jatah menteri. Hal ini karena partai tersebut telah menjadi mesin politik bagi pemenangan paslon dalam Pilpres (Media Indonesia, 1 Juli 2019). Dengan kata lain meskipun rekonsiliasi dengan pihak non-pendukung dilakukan, namun kinerja mesin partai dalam mendukung kemenangan pasangan calon presiden dalam pilpres sebaiknya dilanjutkan melalui dukungan partai tersebut dalam kinerja pemerintahan juga.

Penutup

Berdasarkan hal tersebut di atas maka posisi menteri dalam kabinet pemerintahan periode Jokowi periode 2019-2024 diperkirakan masih tetap akan lebih banyak diisi oleh pihak dari partai pendukung. Namun, tidak tertutup berbagai kemungkinan dan peluang mengingat bahwa jabatan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Meskipun demikian, hal yang harus menjadi perhatian setiap pihak ialah perlu adanya sebuah rekonsiliasi politik yang membawa kebaikan bagi bangsa. Dalam hal ini rekonsiliasi politik pasca-Pilpres 2019 ialah untuk mempertemukan pihak yang berlawanan saat pemilu namun kembali bekerja sama untuk membangun komunikasi demi terciptanya pemerintahan yang efektif dan kondusif pada periode mendatang.

DPR RI sebagai lembaga dengan fungsi pengawasan perlu untuk terus bersinergi dengan pemerintah sekaligus tetap obyektif dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas jalannya pemerintahan periode 2019-2024 mendatang. Proses check and balances harus terus dilakukan oleh DPR RI agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah membawa dampak bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara terutama pada periode 2019-2024 mendatang.

Referensi

"Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2019", <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/> diakses pada 2 Juli 2019.

"Ini 15 Menteri Jokowi yang Berasal dari Partai Politik", <https://nasional.kompas.com/read/2014/10/26/18101431/ini.15>. Menteri.Jokowi.yang.Berasal.dari.Partai.Politik, diakses pada 2 Juli 2019.

John Paul Lederach. (1999). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington DC : United States Institute of Peace Press.

"Jokowi Isyaratkan Kementrian Baru", *Media Indonesia*, 3 Juli 2019, hal 1.

"Mahfud MD Dalam Politik di Indonesia Rekonsiliasi Selalu Terjadi", Detik.com, 30 Juni 2019 <https://news.detik.com/berita/d-4605489/mahfud-md-dalam-politik-di-indonesia-rekonsiliasi-selalu-terjadi>, diakses 4 Juli 2019.

"Membangun Etika Koalisi dan Oposisi", *Media Indonesia*, 1 Juli 2019, hal 2.

"PDIP Sebut Sudah Biasa Koalisi Dengan Demokrat", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190608233406-32-401824/pdip-sebut-sudah-biasa-koalisi-dengan-demokrat>, di akses 08 Juli 2019.

"Pemerintah Butuh Oposisi di DPR", *Kompas*, 24 April 2019, hal. 11.



Juniar Laraswanda Umagapi
juniar.umagapi@dpr.go.id



Debora Sanur L.
debora.sanur@dpr.go.id

Juniar Laraswanda Umagapi S.IP.,M.A lahir di Tidore, 13 Juni 1993. Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2014 dan Pendidikan S2 Ilmu Politik di National Research University Higher School of Economics Moscow Rusia pada tahun 2017. Saat ini menjabat sebagai calon peneliti pertama di bidang politik dalam negeri pada Pusat Penelitian,Badan Keahlian DPR RI.

Debora Sanur L., S.Sos, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Ilmu Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku dan jurnal, antara lain: "Urgensi Membangun Parlemen Modern" (2015), "Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional" (2016), dan "Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah" (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.